



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alexander Palti  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM Bali

Alexander Palti  
NIP.197311211998031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %
3.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	20 Orang
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
8.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
9.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %
11.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %
12.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %
13.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 8.857.267.000,-</b>
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 5.287.700.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.527.815.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.041.752.000,-
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp. 621.068.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 485.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 136.068.000,-
<b>Program Pemajuan dan Penegakan HAM</b>	<b>Rp. 319.885.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 319.885.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 238.343.000,-</b>
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 238.343.000,-

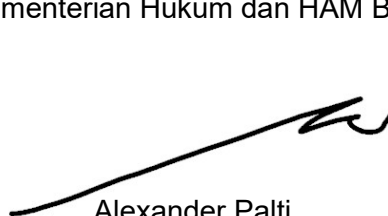
Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali



Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM Bali



Alexander Palti  
NIP.197311211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

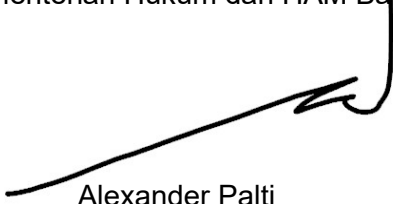
Nama : Alexander Palti  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 22 Januari 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM Bali

  
Alexander Palti  
NIP. 197311211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mamur Saputra

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

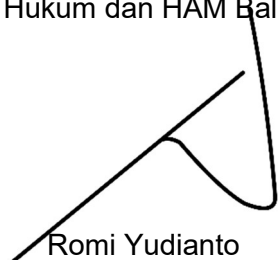
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

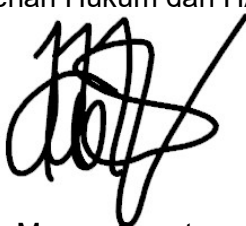
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

  
Romi Yudianto  
NIP.197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali

  
Mamur Saputra  
NIP.197807012003121002

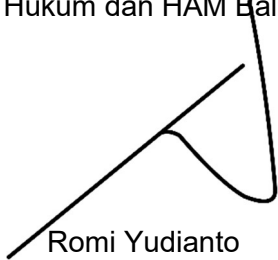
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

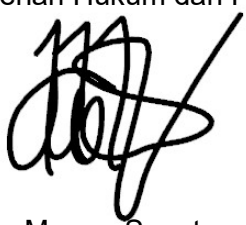
Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 19.678.860.000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.678.860.000,-

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

  
Romi Yudianto  
NIP.197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali

  
Mamur Saputra  
NIP.197807012003121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mamur Saputra

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 22 Januari 2024

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali

Mamur Saputra  
NIP. 197807012003121002





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Barron Ichsan

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

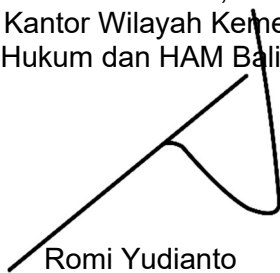
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali



Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali



Barron Ichsan  
NIP.197904142000021001

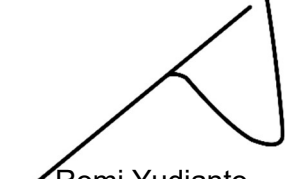
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1.752.358.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.752.358.000,-

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali



Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali



Barron Ichsan  
NIP. 197904142000021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Barron Ichsan

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 22 Januari 2024

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali

Barron Ichsan

NIP. 197904142000021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Putu Murdiana  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kemenkumham Bali

I Putu Murdiana  
NIP.197505031997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	83 Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 %

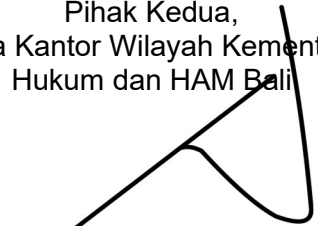
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100 %
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	1 UPT
		2. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	2 UPT

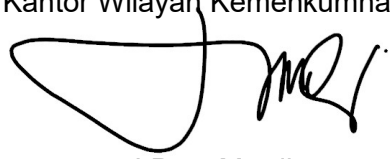
Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 1.057.616.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 1.057.616.000,-

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

  
Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pemasarakatan  
Kantor Wilayah Kemenkumham Bali

  
I Putu Murdiana  
NIP.197505031997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Putu Murdiana  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 22 Januari 2024

Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kemenkumham Bali

I Putu Murdiana  
NIP. 197505031997031001